

**OPTIMALISASI ALOKASI BELANJA MODAL DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI  
KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Hildegardis Sepiah Bere

NPP. 31.0782

*Asdaf Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email : [beresepiah@gmail.com](mailto:beresepiah@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Eko Budi Lestari, SE, MM

***ABSTRACT***

***Problem Statement?Background (GAP):*** This research focuses on the analysis of optimizing capital expenditure allocation with the goal of improving road infrastructure development in Malaka Regency. ***Purpose:*** The purpose of this study is to analyze how the optimization of capital expenditure allocation in improving the construction of road infrastructure in Malaka district of East Nusa Tenggara Province. ***Method:*** This research uses descriptive qualitative method and analysis of optimization according to Siringoringo's theory. Data collection techniques are done with in-depth interviews (5 informants) and documentation. ***Result:*** The result obtained by the authors in this study are the optimization of capital exit allocation for the construction of road unfamiliar roads, this is due to the minimal financial capability that the construction of road infrastructure in Malacca district is not adequate. ***Conclusion:*** optimization of capital exit exitment in improving road infrastructure in Malacca district has not been optimally done in accordance with the provisions, this is due to limited amounts of budgets in financing infrastructure development. In order to improve the optimization of capital expenditure allocations, it is advisable to optimize regional revenues and conduct submission to the central and local governments and to cooperate with a third party.

***Keywords:*** Optimization, Capital Spending, Road Infrastructure

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini berfokus pada analisis optimalisasi alokasi belanja modal dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Malaka. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis bagaimana optimalisasi alokasi belanja modal dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Malaka provinsi Nusa Tenggara Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis terhadap optimalisasi menurut Teori Siringoringo. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan wawancara mendalam (5 informan) dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu optimalisasi alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur jalan belum optimal, hal ini dikarenakan kemampuan keuangan daerah yang masih minim sehingga pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Malaka belum memadai. **Kesimpulan:** optimalisasi alokasi belanja modal dalam meningkatkan infrastruktur jalan di Kabupaten Malaka belum dilakukan secara optimal sesuai dengan ketentuan, hal ini disebabkan oleh jumlah anggaran yang terbatas dalam membiayai pembangunan infrastruktur. Guna meningkatkan optimalisasi alokasi belanja modal, disarankan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan melakukan pengajuan kepada pemerintah pusat dan daerah serta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

**Kata Kunci:** Optimalisasi, Belanja Modal, Infrastruktur Jalan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kondisi ekonomi di dunia pada saat ini sedang menjadi sorotan setelah krisis yang terjadi di negara bagian barat khususnya di benua eropa. Hal ini menjadi potensi yang dapat memberikan dampak terhadap Indonesia, namun perlu diketahui juga bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk terus bangkit dan mampu untuk berkonsentrasi pada pemberdayaan produk-produk domestik serta melakukan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan sehingga dapat membuat Indonesia mampu melakukan pemerataan kesejahteraan kepada masyarakat. Kondisi geografis Indonesia saat ini menjadi salah satu keuntungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, karena melalui potensi sumber daya ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Selain itu dengan kemajemukan yang dimiliki, kondisi demografi Indonesia apabila dikelola dengan tepat sasaran akan membawa dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia yaitu melalui pembangunan apabila dilakukan secara konsisten.

Berpedoman pada visi Indonesia Emas 2045, salah satu fokus utama pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ialah dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama. Untuk merealisasikan pembangunan tersebut pemerintah harus menyiapkan anggaran dan mengalokasikannya kepada instansi-instansi terkait. Pembangunan infrastruktur memiliki peran sangat penting dalam memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, meningkatkan konektivitas antar kawasan dan pelayanan publik baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Desentralisasi memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan 'Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan adanya desentralisasi,

pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, hal ini dilakukan dengan tujuan agar pemerintah daerah dalam pelaksanaannya tugasnya dapat melakukan percepatan pembangunan dan meninggalkan ketertinggalan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tentulah membutuhkan pendanaan anggaran belanja daerahnya sendiri untuk membiayai segala aspek kebutuhan daerah demi terwujudnya keberhasilan pembangunan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah bersumber dari pendapatan asli daerah dan transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 06/PMK 07/2012 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran tranfer ke daerah pasal 3 bahwa Anggaran Transfer ke Daerah meliputi Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) merupakan suatu instansi yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur. Fokus pembangunan infrastruktur di tahun 2023 adalah pada pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan khususnya pekerjaan konstruksi yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain itu, dalam pelaksanaannya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) melakukan pembangunan infrastruktur pada empat bidang utama yakni sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman serta perumahan. Melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR) akan mengoptimalkan infrastruktur yang ada.

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu kebutuhan yang sangat tinggi, namun dalam pelaksanaannya selain anggaran yang menjadi faktor utama yang dapat menghambat dan membatasi proses pelaksanaan pembangunan, kondisi geografis pun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pembangunan infrastruktur. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diketahui memiliki anggaran yang sangat terbatas dengan jumlah belanja yang besar dan terus meningkat setiap tahunnya yang harus dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam menganggarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) daerahnya masing-masing untuk pembangunan infrastruktur yaitu dengan melakukan belanja daerah. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).

Belanja daerah sendiri dikategorikan menjadi beberapa jenis belanja yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Anggaran belanja modal dalam APBD merupakan salah satu bentuk pengalokasian anggaran pemerintah daerah yang didasarkan pada kebutuhan daerahnya masing-masing. Anggaran yang digunakan untuk belanja infrastruktur yaitu belanja modal. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja modal bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Non Fisik, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan dana transfer lainnya yang bersifat wajib (mandatory).

Berdasarkan tematik dari Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan khusus untuk Kawasan Indonesia bagian Timur (KTI) khususnya di bidang transportasi perairan, transportasi perdesaan, dan bidang jalan menjadi fokus pembangunan dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Wempi dalam kuliah umum di Universitas Nusa Cendana (UNDANA) Kupang menyampaikan bahwa untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Timur, termasuk NTT harus ditingkatkan dan dalam pelaksanaannya peran para Kepala Daerah dibutuhkan untuk mendukung pembangunan khususnya dalam hal pembebasan lahan.

Pada penelitian ini, penulis fokus pada pembangunan infrastruktur jalan yang disesuaikan dengan kondisi daerah di kabupaten Malaka dimana keadaan infrastruktur jalan yang masih dalam keadaan belum memadai dimana kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi mobilisasi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dan badan usaha di kabupaten Malaka.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)**

Kondisi jalan di kabupaten Malaka sebagian besar masih dalam kondisi rusak, baik itu rusak ringan, sedang, maupun berat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kondisi geografis yang berbukit-bukit dan rawan longsor, curah hujan yang tinggi, penggunaan kendaraan dengan muatan yang berlebih (*overload*) dan kurangnya dalam pemeliharaan jalan. Tingkat kelayakan jalan provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia juga masih terbilang rendah. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tingkat kelayakan jalan provinsi di Indonesia pada tahun 2022 adalah 64,9%, sedangkan tingkat kelayakan jalan kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2022 adalah 56,7%. Kemampuan keuangan kabupaten Malaka belum maksimal dan masih dalam keadaan keterbatasan dalam melakukan pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini memiliki beberapa referensi dari penelitian terdahulu. Penelitian (Nurhidayati & Yaya, 2013) yang berjudul Alokasi Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik : Praktik Di Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas keuangan dan DAK berpengaruh positif dalam proporsi belanja modal. Sementara kemandirian dan DAU berpengaruh negative tapi signifikan dengan proporsi belanja modal. Sedangkan efisiensi dan SiLPA tidak berpengaruh signifikan dalam proporsi belanja modal.

Penelitian (Murtin, 2015) berjudul Optimalisasi Peran Analisa Standar Belanja Dalam Penyusunan Anggaran Belanja SKPD Di Kabupaten Lingga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diperlukan instrument dokumen Analisa Standar Belanja selain SPM dan Standar Satuan Harga dalam optimalisasi penyesuaian anggaran belanja SKPD.

Penelitian (Waryanto, 2017) yang berjudul Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan belanja operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian (Rambe & Iskandar, 2021) yang berjudul Peran belanja modal pada infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Sleman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberadaan jalan berpengaruh positif dan langsung terhadap variabel modal dan jumlah angkatan kerja serta laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan jika dilihat berdasarkan hasil interpretasi tersebut keberadaan jalan kabupaten mengindikasikan tidak

berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman.

Penelitian yang dilakukan oleh (Made Ari & Santi Suryantini, 2018) tentang Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah metode sampling jenuh. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Penelitian (Andriani, 2020) yang berjudul Analisis Kinerja Belanja Daerah Di Kabupaten Sarolangun. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan analisis perkembangan belanja daerah, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, analisis efisiensi belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan belanja daerah Kabupaten Sarolangun selama tahun 2006–2012 mengalami perkembangan rata-rata 20,67%. Untuk kinerja belanja daerah dari sisi keserasian dikatakan baik dalam mengalokasikan belanja daerah karena alokasi belanja operasional lebih besar daripada belanja modal. Sedangkan tingkat rata-rata efisiensi belanja Pemerintah Kabupaten Sarolangun selama tahun 2006–2012 sebesar 86,64% yang tergolong efisien.

Penelitian dari (Christivera et al., 2020) yang berjudul Analisis Empiris Faktor Determinan Struktur Modal Perusahaan Infrastruktur Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis multiple regression. Penentuan sampel menggunakan non-probability sampling, khususnya metode purposive sampling. Penelitian ini memakai satu pengukuran struktur modal (utang) sebagai variabel dependen dan empat pengukuran kinerja perusahaan (termasuk company's size, the tangibility of asset, liquidity, and asset turnover) sebagai variabel independen dan diolah menggunakan multiple regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa liquidity memiliki hubungan yang secara signifikan negatif terhadap leverage, sedangkan company's size, the tangibility of asset, dan asset turnover tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat utang perusahaan Infrastruktur di Indonesia, namun mengikuti penalaran pada Teori Pecking Order.

Penelitian dari (Kusuma, 2019) yang berjudul Pengaruh Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Dalam Pembangunan Daerah The Effect of Economic and Social Infrastructure in Regional Development. Penelitian ini menggunakan data panel: fixed effect model with cross-section weights (Panel EGLS). Dari estimasi, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa semua infrastruktur dan angkatan kerja yang bekerja memberikan pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah kecuali jalan. Semua infrastruktur yang signifikan dan angkatan kerja yang bekerja memberikan efek positif bagi pembangunan daerah. Angkatan kerjayang bekerja memberikan dampak terbesar bagi pembangunan daerah diikuti oleh listrik dan akses air bersih.

Penelitian dari (Jegiftha et al., 2018) yang berjudul Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan analisis data interaktif. Dari target pembangunan jalan pada tahun 2017 yang ditetapkan sepanjang 25.014 km, ternyata yang dapat direalisasikan hanya sepanjang 17,533 km atau bila dipersentasikan sebesar + 70 %, hal ini terjadi akibat adanya defisit anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, sementara untuk pembangunan jembatan dari target sepanjang 34,7 km realisasinya sepanjang 34,7 atau 100% tercapai, untuk itu disarankan agar Dinas PUTR mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemangkasan anggaran yang mengakibatkan pencapaian target pembangunan jalan tidak tercapai. Untuk menghilangkan kesan buruk tentang pembangunan

jalan yang kualitasnya kurang baik, disarankan agar dinas PUTR memberikan layanan yang sama dalam membangun jalan dan jembatan di desa – desa yang jauh dari ibukota kabupaten, seperti di desa - desa yang ada di pulau Kabaruan, dan untuk meningkatkan kinerja staf dinas PUTR sebaiknya bila semua staf memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam organisasi.

Penelitian dari (Pambudi et al., 2022) dengan judul Analisis Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Provinsi Papua Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan mixed method melalui analisis gap berbasis studi literatur RKP dan RKPD pada 34 Provinsi di Indonesia, kuisisioner serta site visit. Berdasarkan hasil analisis kesenjangan perencanaan (RKP-RKPD di 34 Provinsi seluruh Indonesia), hanya 3 (tiga) Provinsi yang tidak mencantumkan menu kegiatan Bidang Jalan dari alokasi DAK dalam RKPD-nya yaitu Provinsi Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Hasil analisis juga menunjukkan terdapat 24 RKPD Provinsi telah sesuai 100 persen dengan muatan DAK dalam RKP, 5 Provinsi hanya menetapkan 66 persen dan 2 Provinsi menetapkan 33 persen. Pada lokasi studi kasus di Papua Barat terkait konteks DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan, dokumen RKPD Papua Barat Tahun 2019 belum sepenuhnya memiliki rencana spesifik sesuai dengan menu kegiatan DAK. Pada aspek pelaksanaan juga ditemukan banyak permasalahan yang berkaitan dengan regulasi dan tata kelola yang memerlukan perhatian lebih, baik secara top down maupun bottom up.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana lokus dan fokus penelitian, serta metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kaulitatif deskriptif.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai optimalisasi alokasi belanja modal dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2018:2) menyatakan bahwa: “Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berasal dari masalah sosial atau masalah dari manusia itu sendiri. Adapun metode dalam pendekatan kualitatif ini menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilaksanakan dengan menuangkan gambaran serta uraian secara jelas terhadap objek penelitian yang diteliti, kemudian menganalisis data dengan kerangka berpikir untuk memahami sesuatu dengan membuat pengamatan khusus dan kemudian menarik kesimpulan luas berdasarkan pengamatan tersebut.

Penulis mengumpulkan data yang bersumber dari data primer dan sekunder melalui dokumentasi, dan wawancara. Menurut Simangunsong (2017:215) wawancara merupakan suatu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara bertanya dan menjawab antara peneliti dengan informan terkait. Simangunsong (2017:223) menjelaskan bahwa selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa didapatkan lewat fakat yang tersimpan baik dalam bentuk cenderamata, jurnal kegiatan, surat, catatan, harian, hasil rapat, arsip foto, dan lain sebagainya.

Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka, Kepala Bidang

Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Malaka dan masyarakat sebanyak 3 orang, dengan metode *purposive sampling*. Adapun analisisnya menggunakan teori Optimalisasi menurut Siringoringo yang terdiri dari atas 3 dimensi yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang membatasi. Adapun teknisnya yaitu dengan analisis data oleh Sugiyono (2019:246) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis optimalisasi alokasi belanja modal dalam meningkatkan infrastruktur jalan kabupaten Malaka provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan teori Optimalisasi dari Siringoringo yang menyatakan bahwa optimalisasi sebagai suatu proses untuk mencari solusi yang terbaik, dan tidak selalu yang diuntungkan namun dapat mencapai tujuan dari optimalisasi yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dimana untuk biaya tidak selalu dapat ditekan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa dikenakan, dengan kata lain optimalisasi didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Siringoringo (2005:5) terdapat tiga elemen yang perlu diidentifikasi permasalahannya dalam optimalisasi, yakni tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang terbatas

#### 3.1 Tujuan

Tujuan bisa dalam bentuk maksimisasi dan minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan dan sejenisnya. Sedangkan bentuk minimisasi dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak dan sejenisnya.

##### a. Mengoptimalkan Alokasi Anggaran Belanja Modal Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pengelolaan keuangan daerah di BPKPD Kabupaten Malaka, khususnya dalam alokasi belanja modal untuk infrastruktur, harus dilakukan secara efisien, transparan, akuntabel, dan terbuka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, manajemen keuangan untuk belanja modal belum optimal karena kebutuhan anggaran yang tinggi namun ketersediaan anggaran yang terbatas.

##### b. Meminimalisir Biaya Pengeluaran Lain

Pengelolaan anggaran belanja daerah harus cerdas dan bijak yakni dengan mempertimbangkan jumlah anggaran yang tersedia dengan kebutuhan pembangunan yang tercantum dalam rencana kerja. Prioritas pembangunan daerah harus menjadi fokus utama dalam alokasi dana untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi prioritas. Meminimalisir anggaran dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti, memproyeksikan keuangan dalam satu periode anggaran, penghematan biaya untuk hal mendesak dan darurat, serta menghindari pemborosan dalam pembelian aset.

##### c. Ketersediaan Infrastruktur Jalan Yang Baik dan Memadai

Pembangunan daerah tujuannya untuk mengadakan Infrastruktur yang baik. Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan sosial keberadaan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan sangat penting karena infrastruktur jalan yang baik dapat meningkatkan sinergi efektivitas dan efisiensi di melalui mobilisasi di sektor usaha maupun bagi sistem sosial di masyarakat. Infrastruktur jalan yang memadai berdampak pada biaya produksi dan

transportasi murah, sehingga jumlah produksi dan keuntungan meningkat, pendapatan yang diperoleh masyarakat meningkat.

### **3.2 Alternatif Keputusan**

Alternatif keputusan adalah pilihan dari berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Dari sejumlah alternatif yang tersedia, dipilihlah yang terbaik berdasarkan kriteria tertentu, dengan mempertimbangkan dampak positifnya serta risiko yang paling rendah. Proses pengambilan keputusan ini melibatkan identifikasi masalah, perumusan masalah, dan seleksi alternatif keputusan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

#### **a. Pengelolaan Anggaran Belanja Modal dengan Optimal**

Pengelolaan keuangan dianggap efektif ketika anggaran yang tersedia cukup untuk mendanai rencana kerja yang telah disusun. Jika anggaran terbatas dan tidak dapat mendukung pelaksanaan program kerja, maka pengelolaan keuangan tidak dapat dianggap optimal. Faktor ini berkaitan dengan kualitas kinerja pegawai dalam melakukan perencanaan dan estimasi yang tepat, sehingga alokasi belanja modal dapat diatur secara efisien. Pengelolaan keuangan di kantor BPKPD Kabupaten Malaka harus dilakukan oleh seluruh pegawai dengan tujuan untuk menstabilkan dan mengoptimalkan anggaran yang ada. Agar hal ini tercapai, seluruh pegawai perlu memiliki pemahaman yang mendalam dalam merencanakan anggaran serta berfokus pada peningkatan kinerja. Dengan demikian, pengelolaan keuangan dapat berjalan secara efektif.

#### **b. Prioritas Peningkatan Anggaran Belanja Modal**

Prioritas merupakan suatu proses yang menempatkan suatu kegiatan pada posisi yang utama, mendahulukan kegiatan tersebut atau kegiatan lainnya sesuai dengan tingkat kepentingan, urgensi atau dampaknya. Anggaran belanja modal yang masih minim untuk direalisasikan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan program kerja Bupati Kabupaten Malaka, Dr. Simon Nahak, SH.MH mengenai peningkatan pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur jalan baik dalam kota maupun jalan lingkungan atau jalan non status. Adanya instruksi tersebut sangat berpengaruh terhadap jumlah anggaran belanja modal. Dengan demikian BPKPD Kabupaten Malaka dalam pengelolaan keuangan daerah melakukan peningkatan anggaran belanja modal dari segala sumber pendapatan keuangan daerah guna mempercepat pembangunan Infrastruktur khususnya infrastruktur jalan di Kabupaten Malaka.

### **3.3 Sumber Daya Yang Membatasi**

Sumber daya yang membatasi adalah faktor-faktor yang memiliki dampak untuk menghambat atau menghalangi suatu kemampuan dalam mencapai tujuan tertentu atau mengoptimalkan hasil dari suatu proses. Sumber daya ini bisa berupa fisik (seperti bahan baku, tenaga kerja, atau modal), atau non-fisik (seperti waktu, pengetahuan, atau teknologi). Pada penelitian ini, ada beberapa sumber daya yang membatasi dalam proses optimalisasi

#### **a. Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan keuangan merupakan suatu aspek dasar pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan operasional pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Anggaran dan kemampuan keuangan yang terbatas menjadi hambatan yang paling utama dalam melakukan pembiayaan kegiatan pemerintahan. Menurut (Sinurat et al., 2023) bahwa Kemandirian keuangan daerah merupakan keadaan di mana pemerintah daerah mampu secara mandiri membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahannya dengan sumber pendanaan berasal dari PAD. Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan keuangan pemerintah daerah kabupaten Malaka dalam membiayai pembangunan infrastruktur jalan belum mampu atau belum mandiri, hal ini dikarenakan sebagian besar anggaran yang digunakan bersumber dari dana transfer pemerintah pusat yang dibuktikan dengan Data Jumlah Pendapatan APBD Kabupaten Malaka khususnya di tahun 2020 pada persentase jumlah anggaran pendapatan transfer terhadap total pendapatan sebesar 90,09%, dan jumlah pendapatan daerah dalam menopang pembiayaan pembangunan sangat minim yang dibuktikan dengan persentase PAD terhadap total pendapatan yaitu sebesar 4,41% sehingga apabila dilakukan pembangunan diperlukannya biaya tambahan.

b. Sumber Daya Manusia Yang Terbatas

Seluruh kegiatan pemerintahan sangat bergantung pada peran manusia yang menjadi aktor utama dalam menjalankan pemerintahan tersebut, oleh karena itu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting. Sumber Daya Manusia Yang Terbatas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Malaka khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) BPKPD Kabupaten Malaka mengalami keterbatasan sumber daya manusia, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas.

c. Kondisi Geografis Yang Tidak Mendukung

Kondisi Geografis menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi salah satu sasaran atau tujuan yaitu kondisi infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Kondisi geografis sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan infrastruktur jalan, karena apabila kondisi geografis tidak mendukung maka pembangunan akan menjadi terhambat dan anggaran yang dikeluarkan akan semakin bertambah, karena waktu pembangunan yang mengalami perubahan akibat kondisi geografis yang tidak mendukung. Berdasarkan hasil penelitian dari data Kondisi Geografis yang diperoleh dari Dinas PUPR Kabupaten Malaka, diketahui bahwa kondisi geografis kabupaten Malaka terdiri atas empat kawasan, yakni kawasan banjir, longsor, tsunami dan abrasi pantai. Tentunya kondisi ini perlu diperhatikan pemerintah kabupaten Malaka agar dapat melakukan pembangunan dengan tetap sasaran serta melakukan kajian terkait konstruksi yang sesuai dengan kondisi kawasan yang bermasalah tersebut.

### 3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Optimalisasi alokasi belanja modal sangat berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat, dimana peningkatan pembangunan ini dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah di kabupaten Malaka dan mobilitas masyarakat dapat berjalan lancar, dan ini juga berdampak pada aktivitas ekonomi yang dapat meningkat melalui peningkatan sarana dan prasarana jalan, hal ini sesuai dengan penjelasan dari penelitian

sebelumnya oleh (Rambe & Iskandar, 2021) yang menjelaskan bahwa Keberadaan jalan berpengaruh positif dan langsung terhadap modal.

Pada penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka, dan penjelasan yang dilakukan melalui dimensi-dimensi dan indikator yang ditetapkan, penulis menemukan bahwa alokasi belanja modal dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Malaka masih belum optimal. Hal utama yang menjadi faktor penghambat atau kendala dalam optimalisasi alokasi belanja modal yakni kemampuan keuangan daerah yang masih minim dalam melakukan pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan dan itu perencanaan alokasi anggaran yang belum sesuai atau tepat sasaran, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurhidayati & Yaya, 2013) bahwa efektifitas penggunaan sangat mempengaruhi proporsi belanja modal. Sementara kemandirian dan DAU berpengaruh negatif tapi signifikan dengan proporsi belanja modal. Sedangkan efisiensi dan SiLPA tidak berpengaruh signifikan dalam proporsi belanja modal. dari uraian tersebut maka pemerintah Kabupaten Malaka berupaya meningkatkan dan mengoptimalkan alokasi belanja modal dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dengan mengoptimalkan penerimaan daerah yakni pajak dan retribusi daerah serta sumber penerimaan daerah lainnya, selain itu melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah atau pihak ketiga serta melakukan pinjaman dalam membantu membiayai pembangunan infrastruktur jalan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa optimalisasi alokasi belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Malaka masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh program kerja yang banyak dengan kebutuhan anggaran belanja modal juga yang besar sehingga tidak semua program kerja dapat terpenuhi. Oleh karena itu diperlukan peningkatan anggaran belanja modal, agar dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dengan baik. Adapun faktor Penghambat yang mempengaruhi dalam optimalisasi alokasi anggaran belanja modal dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi, kemampuan keuangan yang belum optimal dan perencanaan alokasi belanja modal yang belum baik. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malaka dalam mengoptimalkan alokasi belanja modal dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan yakni melakukan perencanaan alokasi anggaran belanja modal dengan baik, pengajuan kepada pemerintah pusat atau daerah, pinjaman daerah dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

#### **Keterbatasan Penelitian.**

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu sulitnya mendapatkan informasi karena terdapat beberapa data dan informasi yang cukup sensitif. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan pada waktu dan lokus penelitian. Penelitian hanya dilakukan pada wilayah sesuai lokus penelitian.

#### **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).**

Penulis menyadari bahwa masih awalnya temuan penelitian, sehingga penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi lainnya terkait optimalisasi alokasi belanja modal dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih Pemerintah Kabupaten Malaka khususnya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Malaka yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, I. (2020). Analisis Kinerja Belanja Daerah Di Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 9(2), 120–128.  
<https://doi.org/10.22437/jmk.v9i2.12041>
- Christivera, A., Gunawan, D., & Fendi, D. J. (2020). Analisis Empiris Faktor Determinan Struktur Modal Perusahaan Infrastruktur Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 10(3), 147–158. <https://doi.org/10.29244/jmo.v10i3.30142>
- Creswell, John W.. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approaches Fifth Edition*. London: SAGE PUBLICATIONS, Inc.
- Jegiftha, L., Gosal, R., & Sambiran, S. (2018). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Kusuma, W. D. (2019). Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial dalam Pembangunan Daerah The Effect of Economic and Social Infrastructure in Regional Development. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(2), 114–129.  
<https://anggaran.e-journal.id/akurasi>
- Made Ari, J., & Santi Suryantini, N. P. (2018). Pengaruh PAD,DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), 1255–1281.
- Murtin, A. (2015). Optimalisasi Peran Analisa Standar Belanja Dalam Penyusunan Anggaran Belanja SKPD Di Kabupaten Lingga. *Ekp*, 13(2).
- Nurhidayati, L. L., & Yaya, R. (2013). Alokasi belanja modal untuk pelayanan publik: praktik di pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(2), 102–114.  
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss2.art2>
- Pambudi, A. S., Hidayati, S., & Pramujjo, B. (2022). Analisis Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jalan: Studi Kasus Perencanaan dan Pelaksanaan di Provinsi Papua Barat. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 188–210.

<https://doi.org/10.26905/pjiap.v7i2.7645>

Rambe, S. S. U., & Iskandar, D. A. (2021). Peran Belanja Modal Pada Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Pembangunan*, 3(2), 88–96. <https://doi.org/10.36087/jrp.v3i2.78>

Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.

Sinurat, M., Sudrajat, I., & Komedi, K. (2023). Kemandirian Keuangan Daerah Kota Pekanbaru. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 10(2), 216–232. <https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3922>

Siringoringo, H. (2005). Seri Teknik Riset Operasional: Pemrograman Linear. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono, (2019). Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D) Bandung: Alfabeta.

Waryanto, P. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 35–55. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.13>

